CONSILIUM Journal : Journal Education and Counseling
p-ISSN :[2775-9465]
e-ISSN :[2776-1223]

POLA INTERGOVERMENTAL RELATIONS PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SMART KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SEMBULUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Muhamad Hafiz Rafiqi, Auliya Sofwatul Arifah, rintahan, Artika Sari Devi, Nina Anggei Febrianti, Ria Angin

Universitas Muhammadiyah Jember

Email Korespondensi: mashafiz175@gmail.com , auliya.sofwatul@gmail.com, deviartika016@gmail.com, ninaanggei19@gmail.com, ria.angin@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Program ini telah berhasil menciptakan sistem layanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pelatihan dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat didorong untuk mengembangkan produk lokal dan memanfaatkan platform online untuk meningkatkan perekonomian lokal. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan pelatihan bagi aparatur desa masih perlu diatasi. Penyesuaian kebijakan yang berbasis pada umpan balik masyarakat menjadi kunci untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik di masa depan. Dengan demikian, Program Smart Kampung diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Smart Kampung, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

PENDAHULUAN

Teori Intergovernmental Relations (IGR) merujuk pada pola interaksi dan hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan, baik itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara berbagai lembaga dalam satu negara yang memiliki sistem pemerintahan desentralisasi atau federal. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah di

berbagai tingkat saling berhubungan, berkoordinasi, berkompetisi, atau bahkan berbenturan dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan publik (Zainal 2018).

Menurut (Zainal 2018) Pola interaksi yang terjadi dalam IGR bisa bervariasi, tergantung pada struktur pemerintahan dan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Pada dasarnya, IGR berfokus pada cara-cara di mana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, berkompetisi, atau terkadang mengalami konflik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka. Ini termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan nasional diimplementasikan di tingkat lokal, bagaimana sumber daya dialokasikan, serta bagaimana pembagian kewenangan ditangani.

Dalam beberapa kasus, hubungan antar pemerintah dapat terjadi dalam bentuk koordinasi dan kerjasama yang erat. Misalnya, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerjasama dalam menetapkan kebijakan yang mencakup sektor-sektor tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Kerjasama ini seringkali dilandasi oleh kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, interaksi antara pusat dan daerah bersifat saling mendukung dan melengkapi, di mana kedua pihak memiliki peran masing-masing, namun bekerja secara sinergis untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Selain itu, teori IGR juga memperkenalkan konsep subsidiaritas, yang menyarankan bahwa keputusan-keputusan penting sebaiknya dibuat pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Konsep ini berargumen bahwa kebijakan dan program yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga negara sebaiknya dikelola oleh pemerintah daerah, karena mereka lebih memahami kondisi lokal. Dalam hal ini, interaksi antara pusat dan daerah mencerminkan prinsip otonomi, di mana daerah diberikan ruang lebih besar untuk menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal.

Secara keseluruhan, teori Intergovernmental Relations menggambarkan dinamika hubungan yang kompleks antara tingkat-tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Hal ini tidak hanya melibatkan kerjasama dan koordinasi yang saling mendukung, tetapi juga konflik, ketegangan, dan bahkan kompetisi dalam pembagian kewenangan, pengalokasian sumber daya, dan implementasi kebijakan. Pola-pola ini bergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi suatu negara serta desain sistem pemerintahan yang diterapkan, apakah itu lebih sentralistik atau lebih desentralistik.

Pola interaksi yang terjadi dalam IGR bisa bervariasi, tergantung pada struktur pemerintahan dan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Pada dasarnya, IGR berfokus pada cara-cara di mana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, berkompetisi, atau terkadang mengalami konflik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka. Ini termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan nasional diimplementasikan di tingkat lokal, bagaimana sumber daya dialokasikan, serta bagaimana pembagian kewenangan ditangani. Pola interaksi yang terjadi dalam IGR bisa bervariasi, tergantung pada struktur pemerintahan dan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Pada dasarnya, IGR berfokus pada cara-cara di mana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, berkompetisi, atau terkadang mengalami konflik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suyatno n.d.). Pelayanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip penting, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kemudahan akses. Pelayanan publik juga harus diselenggarakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas untuk membangun

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Suyatno n.d.). Kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan standar pelayanan publik melalui berbagai kebijakan dan inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses terhadap layanan dan mempercepat proses pemberian layanan.

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diawasi oleh badan independen yaitu Ombudsman Republik Indonesia (Muslimin B Putra 2020). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik diberikan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat sebagai penerima layanan.

Program Smart Kampung adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Smart Kampung mengintegrasikan berbagai layanan publik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat desa. Ini termasuk pelayanan administratif dan non-administratif yang kini dapat dilakukan secara digital, sehingga mempercepat proses dan mengurangi biaya. (Hakim, Utami, and Basya 2022) Menurut Heryanto Monoarfa pelayanan publik adalah pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapapun menerimanya. Melalui program smart kampung, pemerintah desa dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Adanya program ini didasari oleh kondisi geografis Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar merupakan pedesaan**,** jarak antar desa, dan jarak antar kecamatan dengan

kecamatan lain yang lebih jauh. Mengakses layanan Kabupaten Banyuwangi bisa memakan waktu hingga 3 jam dengan mobil di beberapa wilayah (Manar et al., 2021). Terdapat tujuh kriteria Smart Kampung. Hal tersebut adalah integrasi pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan seni dan budaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan literasi informasi hukum. Di bidang pemberdayaan ekonomi, program Smart Kampung mentransformasikan pusat-pusat komunitas menjadi pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha, antara lain: Batik dan hasil pertanian. Hasil pengembangan usaha tersebut nantinya akan dijual atau dipasarkan melalui website belanja online Banyuwangi-Mall.com. Program Smart Kampung ini memungkinkan untuk mempromosikan produk lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan proses pelayanan publik yang hakikatnya memanfaatkan teknologi informasi agar masyarakat luas dapat mengakses pelayanan publik dimana dan kapan saja tersedia . Setiap Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sudah mengadopsi aplikasi Smart Kampung untuk memberikan pelayanan kepada warganya , sehingga warga tidak perlu lagi menunggu datang ke kantor desa untuk memperoleh layanan publik seperti pengurusan administrasi .aplikasiuntuk memberikan pelayanan kepada penghuninya , sehingga penghuni tidak perlu menunggumengunjungi kantor desa untuk mendapatkan layanan publik seperti bantuan administrasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi Smart Kampung di Implementasikan pada Portal SimDes : Memfasilitasi pendataan dan administrasi secara online, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Berikut ini adalah beberapa pelayanan publik dalam aplikasi Smart Kampung:

1. Registrasi Kependudukan: 4.444 orang dapat mendaftarkan kependudukannya secara mandiri melalui platform online.

2. Pengajuan Izin Usaha: Layanan ini memungkinkan Anda mengajukan permohonan izin usaha secara online.

3. Pelayanan Administratif: Meliputi pengelolaan kependudukan dan pengelolaan permohonan izin di bidang kesehatan.

4. Informasi terkini: Aplikasi ini juga menyediakan informasi terkini tentang berita terkini, jadwal acara, pariwisata dan kuliner, dll.

5. Peningkatan pendidikan dan kesehatan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan dengan mengintegrasikan teknologi TIK dengan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif.

6. Pemberdayaan Ekonomi : Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi.

7. Operator jalan raya dan berbagi sepeda: Bekerja sama dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang untuk mengembangkan program berbagi sepeda dengan operator jalan raya.

Tujuan Penelitian dengan menggunakan Pola Intergovernmental Relations, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran penting yang dimainkan oleh perangkat desa dalam proses pelayanan publik, serta bagaimana mereka dapat memberdayakan masyarakat melalui program-program inovatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan *Smart Kampung* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa lainnya. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori inovasi pemerintahan dan praktik terbaik dalam konteks pelayanan publik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pola intergovernmental relations (IGR) dan implementasi kebijakan program Smart Kampung dalam konteks pelayanan publik di Desa Sembulung. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut.

PEMBAHASAN

A. Definisi dan Konsep

1. Continous (Berkelanjutan):

Penerapan program Smart Kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Program ini menekankan pentingnya menyediakan layanan yang stabil dan dapat diandalkan, bukan hanya bersifat sementara. Dengan menggunakan aplikasi dan sistem informasi berbasis web,

pemerintah desa dapat memberikan akses layanan kepada masyarakat kapan saja, di mana saja, dan menciptakan pendekatan layanan yang konsisten. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi pada smart kampung maka syarat dan tata cara penerimaan layanan akan lebih mudah dipahami sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Menanggapi kebutuhan masyarakat juga merupakan inti dari program ini. Dengan mengumpulkan data dan masukan dari warga, aparat desa dapat menyesuaikan layanan agar sesuai dengan harapan warga. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik juga dicapai dengan mengurangi kerumitan proses administrasi dan biaya operasional melalui pemanfaatan sistem digital.

Dalam hal ini, pengembangan master plan yang lebih komprehensif dan kebijakan teknis yang lebih jelas menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan program. Selain itu, evaluasi juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi terkait dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Seperti temuan yang dilakukan Fitriana, Hermawan, and Caturiani 2021 Dengan demikian, penyesuaian kebijakan yang berbasis pada hasil evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat secara lebih efektif dalam konteks Program Smart Kampung. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa Program Smart Kmapung dilaksanakan secara bertahap dan teratur, dengan menekankan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi yang konstan. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa Program Smart Kampung dilaksanakan secara bertahap dan teratur, dengan menekankan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi yang konstan.

2. Cumulative (Kumulatif):

Penerapan program Smart kmapung di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap interaksi dan pengalaman layanan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Smart Kampung memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik seperti pengelolaan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan dengan mudah dan cepat.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai prosedur dan syarat dan ketentuan, menghilangkan kebingungan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Program Smart Kampung juga menekankan pentingnya masukan dari masyarakat.

Dengan mengumpulkan data tentang pengalaman pengguna, pemerintah desa dapat mengevaluasi dan terus meningkatkan layanan yang diberikan. Misalnya, jika ada keluhan mengenai waktu tunggu atau prosedur yang rumit, pemerintah bisa segera meresponsnya. Selain itu juga dilakukan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu aparat desa dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Smart village tidak hanya menjadikan pelayanan publik lebih efisien, namun juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu dan memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang lebih baik.

Selain efisiensi, Program Smart Kampung juga meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Aplikasi berbasis online ini akan memungkinkan warga Desa Sembulung mengakses layanan publik dari rumah tanpa harus bepergian jauh ke kantor pemerintahan. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat dengan mobilitas terbatas atau yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting yang akan ditingkatkan melalui implementasi program ini. Seperti temuan yang dilakukan oleh Hakim, Utami, and Basya 2022 Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi tentang prosedur pelayanan dan persyaratan yang diperlukan, sehingga mereka dapat lebih memahami proses yang harus mereka ikuti. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik

B. Pentingnya Aspek Continous and Cumulative dalam Pelayanan Publik

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Program Smart Kampung yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi merupakan contoh nyata bagaimana pelayanan publik yang berkelanjutan dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rephrase Penerapan program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang stabil dan andal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan pelayanan publik terpadu berbasis teknologi informasi di tingkat desa melalui Smart Kampung. Program tersebut mencakup tujuh kriteria utama: pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi pengentasan kemiskinan, dan literasi informasi hukum.

Dari perspektif ekonomi, program desa pintar mendorong pembangunan ekonomi lokal dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan pemerintah, namun juga mendukung inisiatif lokal seperti pengembangan usaha mikro dan wisata desa yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seperti temuan yang dilakukan oleh (Pyvico Fadera Garpy. Elita Nur Holifa 2023) Secara keseluruhan, implementasi program Smart Kampung di Desa Sembulung telah membawa perubahan positif dalam kualitas pelayanan publik. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari kemudahan akses dan kecepatan pelayanan, serta peningkatan transparansi dan partisipasi dalam proses pemerintahan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Meningkatkan Kualitas Layanan

Implementasi program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi mengedepankan pendekatan kumulatif terhadap pelayanan publik dimana setiap pengalaman pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Program ini bertujuan untuk menciptakan siklus perbaikan yang berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Dalam konteks desa cerdas, setiap interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan peluang untuk mengumpulkan masukan yang berharga. Misalnya, ketika anggota masyarakat menggunakan layanan pengelolaan kependudukan melalui aplikasi yang disediakan, mereka dapat memberikan umpan balik mengenai aksesibilitas, waktu tunggu, dan kualitas layanan. Masukan ini akan dianalisis oleh pemerintah dan penyesuaian serta perbaikan akan dilakukan terhadap sistem pemberian layanan yang ada. Dengan cara ini, setiap pengalaman layanan dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, bukan hanya transaksi satu kali saja.

Implementasi Program Smart Kampung di Desa Sembulung Banyuwangi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Program tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Salah satu dampak utama dari program ini adalah meningkatkan efisiensi proses pelayanan. Dulu, pengurusan dokumen seperti pembuatan akta kelahiran dan akta lainnya seringkali memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Saputra and Pratama 2023).Sistem online yang disediakan oleh pemerintah desa telah secara signifikan

mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengisi berbagai formulir tersebut. Misalnya, pembuatan Surat Keterangan Buruk (SPM) yang tadinya memakan waktu enam hari, kini bisa diselesaikan hanya dalam enam jam. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi beban masyarakat yang terus-menerus harus melapor ke pihak berwenang.

3. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Di era digital, pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat menjadi semakin penting. Konsep desa Smart Kampung Sembulung bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan teknologi. Responsif dalam pelayanan publik tidak hanya berarti pemberian layanan secara cepat, namun juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka. Dalam konteks ini, aspek kontinuitas dan kumulatif menjadi sangat penting. Perbaikan berkelanjutan artinya pelayanan publik harus senantiasa dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan masukan masyarakat.

Di Desa Sembulung, implementasi inisiatif Smart Kampung mencakup digitalisasi pelayanan publik. Masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah melalui aplikasi dan platform online. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu tunggu tetapi juga meningkatkan transparansi dalam proses layanan. Bagian penting dari upaya ini adalah pelatihan staf desa untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan baru dan memastikan mereka mampu memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip tanggap dan aspek berkesinambungan dan kumulatif, Desa Semburung tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Inisiatif Smart Village diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Program ini juga membantu mendidik dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Peningkatan akses internet memungkinkan masyarakat menggunakan sumber daya online untuk belajar dan memperluas pengetahuan mereka. Hal ini menciptakan peluang bagi kaum muda untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Dari sudut pandang sosial, desa cerdas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Berkat transparansi pelayanan publik dan peningkatan akses informasi, warga merasa lebih terlibat dalam proses administrasi desa. Hal ini membantu

membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa serta memupuk kerja sama dalam berbagai proyek pembangunan. Seperti yang ada di (BeritaBWI 2016) secara keseluruhan implementasi Program Smart Kampung di Desa Sembulung tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, program tersebut berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih mandiri dan sejahtera.

4. Efisiensi dan Efektivitas dalam Pelayanan Publik

Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam dunia pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas merupakan dua aspek yang sangat penting. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks Smart Kampung, efisiensi dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan proses pengelolaan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, aplikasi dan sistem digital dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mengakses layanan publik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri panjang atau mengisi formulir secara manual. Efektivitas saat ini terfokus pada sejauh mana tujuan pelayanan publik tercapai. Dalam hal ini efektivitas dapat diukur dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Suatu pelayanan dikatakan efektif apabila masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diterimanya telah memenuhi kebutuhan dan harapannya.

Aplikasi Smart Kampung Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik dengan menyediakan informasi mengenai prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Integrasi Data untuk menghubungkan data pengguna data ke sistem yang lebih besar untuk memfasilitasi akses dan pengambilan informasike sistem yang lebih besar untuk memfasilitasi akses dan pengambilan informasi(Mu'izz 2022). Seperti yang ditulis (jippnas.menpan 2024) menyatakan bahwa Perubahan yang mencakup dalam proses pelayanan diantaranya, Pengurangan Waktu Layanan, yang dimana proses proses administrasi yang yang dulunya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya tiga hingga lima menit. Aksesibilitas Layanan, dikarenakan melayani dapat diakses secara lokal melalui kantor desa, masyarakat tidak perlu menunggu untuk bepergian ke lokasi pemerintahan .bisa jadi diakses secara lokal melalui kantor desa ,Masyarakat tidak perlu menunggu untuk datang ke lokasi pemerintahan. Penyebaran informasi, Prosedur dan persyaratan layanan sekarang lebih transparan , sehingga memudahkan masyarakat umum untuk memahami informasi yang

diperlukan .lebih transparan sehingga memudahkan masyarakat umum untuk memahami informasi yang diperlukan.

C. Implementasi Aspek Continous and Cumulative dalam Pelayanan Publik

1. Penggunaan Teknologi:

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan secara real time merupakan langkah yang sangat strategis dalam implementasi program Smart Kampung. Sistem pemantauan waktu nyata memungkinkan Anda mengumpulkan data langsung dari berbagai sumber. Misalnya, sensor yang dipasang pada pipa dapat memberikan data langsung mengenai tekanan, laju aliran, dan kualitas air dengan tujuan untuk menyediakan air bersih. Hal ini tidak hanya memungkinkan Anda mengidentifikasi masalah dengan cepat, namun juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat ketika menghadapi gangguan atau lonjakan permintaan. Selain itu, integrasi Internet of Things (IoT) dan analisis big data meningkatkan kemampuan pemantauan dan mengurangi waktu henti dengan menggunakan analisis big data untuk melakukan pemeliharaan prediktif dan preventif.

Teknologi Smart Kampung dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan desa melalui berbagai mekanisme yang terintegrasi. Program ini menggunakan Sistem Informasi Manajemen Desa (SimDes) untuk mengelola data kependudukan yang terhubung dengan sistem data tingkat kabupaten seperti SIAK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan). Sistem memberi pengguna akses cepat ke layanan manajemen seperti pemprosesan sertifikat hanya dalam 3 hingga 5 menit seperti dalam penelitian (Pyvico Fadera Garpy. Elita Nur Holifa 2023). Smart Kampung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik secara online dan offline. Hal ini mencakup portal layanan publik yang memungkinkan masyarakat memproses berbagai jenis dokumen pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga mengurangi waktu dan biaya perjalanan sama seperti dalam penelitian (Sumaryanti and Muchlis 2023).

2. Pelatihan dan Pengembangan SDM:

Peningkatan kapasitas dan keterampilan pegawai pemerintah melalui pelatihan berkelanjutan merupakan langkah penting dalam implementasi program desa pintar. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan aparat desa agar lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, program pelatihan yang dilakukan di berbagai daerah, seperti Pusdiklat Sriwijaya, menawarkan konten yang mencakup pengelolaan data desa,

pengelolaan keuangan, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Dalam pelatihan ini, aparat desa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis namun juga pengalaman praktis dengan melakukan simulasi situasi kehidupan nyata yang sering ditemui dalam pemerintahan desa. Misalnya saja di Kabupaten Banyuwangi, Program Smart Kampung dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Pelatihan berkelanjutan ini diharapkan dapat mengubah karyawan menjadi agen perubahan yang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan layanan penting, adanya pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa dalam penggunaan teknologi ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Survei menunjukkan bahwa mayoritas aparat kampung dan masyarakat merasa puas dengan penerapan aplikasi ini seperti dalam penelitian ini (Mahardhika 2018).

3. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah kabupaten juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk di Desa Sembulung, yang terlihat dari penelitian mengenai hubungan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes terhadap keberhasilan pembangunan fisik desa. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik untuk Desa Sembulung, umumnya pemerintah kabupaten berperan dalam pengalokasian dan pengawasan penggunaan dana desa. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kabupaten melimpahkan beberapa kewenangan kepada pemerintah desa, sehingga hubungan ini mencerminkan koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan pemerintah Desa Sembulung dalam berbagai aspek pemerintahan dan Pembangunan seperti dalam peelitian (Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, and Adhitya Bayu Suryantara 2022).

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan publik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan, termasuk program Smart Kampung, benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan suara bagi mereka yang terkena dampak, namun juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap layanan yang diberikan. Dalam konteks ini, keterlibatan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya forum diskusi, survei, atau aplikasi seluler di mana warga bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Masukan dari masyarakat sangat penting karena memberikan kita wawasan yang mendalam mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah dapat mengembangkan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, masukan dari masyarakat dapat digunakan dalam proses evaluasi untuk menilai seberapa baik layanan tersebut diberikan.

Penerapan program Smart Kampung di Desa Sembulung, Banyuwangi memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Program ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak utamanya adalah memperkuat perekonomian lokal. Melalui pelatihan dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), masyarakat didorong untuk mengembangkan produk lokal yang dapat dijual lebih luas, termasuk melalui platform online. Misalnya melalui pelatihan teknis, UMKM bisa menjual produknya di situs belanja seperti banyuwangi-mall.com. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita Masyarakat sepertian temuan (Setiawan P, Octawirani, and Perdana W 2016). Selain itu, Smart Kampung berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan publik yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran dan e-KTP, dengan lebih cepat dan efisien. Proses yang dulunya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam berkat sistem digital yang diterapkan. Hal ini mengurangi beban administratif bagi warga dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada kegiatan produktif lainnya.

4. Evaluasi dan Monitoring:

Evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala merupakan langkah penting bagi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, termasuk program Smart Kampung. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana layanan yang diberikan memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan. Pemantauan yang tepat memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan layanan, seperti keterlambatan pemberian layanan, rendahnya kualitas, atau kurangnya akses terhadap segmen masyarakat tertentu. Proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk survei kepuasan masyarakat, analisis data kinerja, dan wawancara pemangku kepentingan. Menganalisis data kinerja seperti waktu respons, jumlah keluhan, dan tingkat keterlibatan masyarakat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas layanan.

Proses pemantauan ini biasanya dilakukan melalui rapat berkala, kunjungan lapangan, dan pelaporan yang terstruktur. Rapat berkala diadakan untuk membahas capaian indikator kinerja dan evaluasi pelaksanaan program, sedangkan kunjungan lapangan memungkinkan pengawas untuk mendapatkan gambaran langsung tentang kondisi di lapangan seperti yang tertulis (alino 2018). Hasil dari pemantauan ini tidak hanya berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan program saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi perencanaan program di masa depan. Dengan demikian, pemantauan yang efektif berkontribusi pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Sembulung. Evaluasi capaian dan dampak Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan penelitian, sebanyak 189 desa telah berhasil dikategorikan sebagai desa maju dan mandiri sejak penerapan kebijakan ini, yang mencerminkan peningkatan dalam aspek sosial dan ekonomi Masyarakat seperti temuan (Ardiyasa and Rahayu n.d.).

Perbaikan dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi Program Smart Kampung sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun banyak kemajuan yang dicapai, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mengutamakan pendekatan partisipatif, di mana masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diintegrasikan ke dalam proses perbaikan.

KESIMPULAN

Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Program ini tidak hanya menyediakan layanan yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal, seperti melalui pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengelolaan data kependudukan yang lebih baik.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa meskipun banyak kemajuan yang dicapai, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pelatihan bagi aparatur desa. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan yang berbasis pada masukan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program. Secara keseluruhan, pendekatan partisipatif dan berkelanjutan dalam

Program Smart Kampung diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

alino. 2018. "Hasil Seleksi Akademik Pretest PPG Mei 2018." *lpmpdki.kemendikbud*. https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/hasil-seleksi-akademik-pretest-ppg-mei-2018/.

Ardiyasa, Gede Gusta, and Ety Rahayu. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI." *Jurnal MODERAT* 8(4). https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat.

BeritaBWI. 2016. "Smart Kampung Banyuwangi Gerakkan Ekonomi Lokal." *BeritaBWI*. https://banyuwangikab.go.id/berita/smart-kampung-banyuwangi-gerakkan-ekonomi-lokal.

Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, and Adhitya Bayu Suryantara. 2022. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2(1): 136–54. doi:10.29303/risma.v2i1.191.

Fitriana, Mira, Dedy Hermawan, and Susana Indriyati Caturiani. 2021. "Evaluasi Formulasi Kebijakan Smart Village Provinsi Lampung." *Wacana Publik* 15(02): 65–74. doi:10.37295/wp.v15i2.78.

Hakim, Abdul, Betty Silfia Ayu Utami, and Maziyah Mazza Basya. 2022. "Dampak Implementasi Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi." *OECONOMICUS Journal of Economics* 6(2): 128–39. doi:10.15642/oje.2022.6.2.128-139.

jippnas.menpan. 2024. "SMART KAMPUNG - INTEGRATED." *jippnas.menpan*.

Mahardhika, Ananda. 2018. *Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar*.

Mu'izz, Abdul. 2022. "Belajar Dari Banyuwangi - Pelayanan Cepat Dengan Smart Kampung." *Majalah cirebon katon*. https://cirebonkaton.dprd.cirebonkab.go.id/artikel/764-belajar-dari-banyuwangi-pelayanan-cepat-dengan-smart-kampung.

Muslimin B Putra. 2020. "Mengenal Pelayanan Publik." *OMBUDSMAN*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik.

Pyvico Fadera Garpy. Elita Nur Holifa. 2023. "Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja." *pubmedia social sciens and humanities*. doi:https://doi.org/10.47134/pssh.v1i1.15.

Saputra, Yoga Aldi, and Muhammad Rizki Pratama. 2023. "Inovasi E-Government Melalui Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 7(1): 30–47. doi:10.30737/mediasosian.v7i1.3174.

Setiawan P, Tree, Panca Octawirani, and Indra Perdana W. 2016. "Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi." *Pemberdayaan Dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa*: 115.

Sumaryanti, Lilik, and Dirwan Muchlis. 2023. “Implementasi Teknologi Berbasis Smart Kampung Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik.” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1): 289–96. doi:10.46576/rjpkm.v4i1.2391.

Suyatno. “Pelayanan Publik.” *balaibahasakalsel*. https://balaibahasakalsel.kemdikbud.go.id/2018/11/19/pelayanan-publik/.

Zainal, Zainal. 2018. “Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Riau.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 14(2): 92–114. doi:10.24042/tps.v14i2.3168.